

RAPAT PARIPURNA DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) memberikan dokumen tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (tengah) saat rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan V tahun 2020-2021 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/5). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap kebijakan kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2022.

Menkeu Beberkan Lima Prioritas Utama Kebijakan Fiskal Tahun 2022

"Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara İebih optimal," ujar Sri Mulyani.

JAKARTA (IM) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) TA 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18, Kamis (20/5). Dalam situasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Pemerintah optimis tahun 2022 dapat menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi.

"Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang selaras dengan tema Rencana Keria Pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal," ujar Sri Mulyani.

Ia menyampaikan, terdapat lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022. Pertama adalah melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan Covid 19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindun-

gan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid 19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha.

"Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber dava manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat,"

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa perbaikan daya saing dan produktivitas memerlukan infrastruktur Information and Communication Technology (ICT), konektivitas, dan energi, serta ketahanan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia. "Reformasi struktural ini harus disertai dengan penguatan institusi dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan pelaksanaan UU Cipta Kerja secara konsisten," ujarnya.

Efektivitas pemulihan dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke

Prioritas kebijakan fiskal

tahun 2022 yang keempat adalah optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui spending better dan inovasi pembiayaan. Ini akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan.

"Upaya optimalisasi pendapatan akan ditempuh melalui penggalian potensi serta perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan," kata Sri Mulyani.

Optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 juga merupakan prioritas utama karena dirancang sebagai fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi dan langkah reformasi struktural, serta reformasi fiskal, kebijakan fiskal tahun 2022 diharapkan semakin efektif, prudent, dan kembali sustainable. Efektivitas proses pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan.

"Di tengah kondisi pemulihan, kita harus tetap optimis dan kita tidak boleh menyerah seperti semangat Hari kebangkitan Nasional. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Sri Mulyani. • dro

Kemenperin Optimalkan Penggunaan **Inovasi Produk Industri Dalam Negeri**

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong inovasi produk industri dalam negeri dapat dioptimalkan, baik itu dari sisi produktivitasnya maupun pemasarannya. Hal ini sejalan dengan program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan substi-

"Jadi, tugas pemerintah itu selain untuk mengawal produknya sampai jadi, termasuk mulai dari proses dan rekayasanya, juga dapat menciptakan market-nya," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seusai nator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandiaitan saat mengunjungi PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT YPTI) di Sleman, Yogyakarta, seperti dilansir dari laman Kemenperin, Kamis (20/5).

Agus menjelaskan, pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian dan lembaga. "Selain itu, kami juga membuka fasilitasi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk memberikan

kepastian legalitas terkait kandungan nilai produk dalam negeri,"

Ia memberikan apresiasi kepada komitmen PT YPTI yang mendukung program P3DN. PT YPTI selaku perusahaan manufaktur yang berdiri sejak tahun 1999 ini telah mengimplementasikan program P3DN dengan mengembangkan welcab (alat bantu disabilitas) Toyota Sienta, komponen pembangkit listrik, alat kesehatan (ventilator dan GeNose C19), mesin perkakas (CNC Milling), serta alat peraga pendidikan untuk sekolah vokasi.

kami percaya bahwa semakin lama akan semakin akurat. Maka terus disempurnakan," terangnya.

Pengembangan alat pendeteksi virus Covid-19 ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. PT YPTI berperan pada produksi komponen mekanik dan plastik pada GeNose C19. Agus menegaskan, pihaknya

aktif memberikan pendampingan kepada industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya sehingga kompetitif di pasar domestik dan ekspor.

bangan produk GeNose C19, Kemenperin mendorong penggunaannya tidak hanya untuk sektor transportasi saja, tetapi juga bisa ke dunia pendidikan.

"Kami akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, agar produk Ge-Nose ini bisa dimanfaatkan untuk memeriksa para muridmurid atau guru-guru di sekolah." tuturnya.

Managing Director PT YPTI Petrus Tedja Hapsoro mengemukakan, selama pandemi Covid-19, aktivitas p rusahaannya tidak terdampak signfikan. PT YPTI berupaya mempertahankan para karyawannya tetap bisa bekerja atau tidak ada PHK. "Kami punya dua bisnis untuk mendukung sektor otomotif, yakni lini produksi dan alat cetakan untuk komponen. Meskipun produksi mengalami penurunan, tetapi untuk pekerjaan di bagian cetakan justru naik karena perusahaan otomotif ada yang mengembangkan model baru,' ungkapnya. • pan

Obligasi Adhi Commuter Properti Laku Rp500 Miliar

JAKARTA (IM) - Surat usaha. utang atau obligasi yang diterbitkan PT Adhi Commuter Properti (ADCP) berhasil terserap sebesar Rp500 miliar. Anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) itu telah menerbitkan obligasi I dengan target Rp500 miliar dan kuponnya hingga 11%.

Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman mengatakan proses penyerapan obligasi ini dilaksanakan pada tanggal 11-17 Mei 2021.

Seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja modal dalam upaya menambah portofolio dan melakukan ekspansi

"Ini akan menjadi langkah awal Adhi Commuter Properti selanjutnya untuk pencatatan saham perdana (IPO) di tahun ini," kata Rizkan dalam keterangan resminya, Kamis (20/5).

Obligasi perdana yang diterbitkan ADCP ini memperoleh hasil pemeringkatan Triple B dari Pefindo.

Di mana, PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi, lalu PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi obligasi dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagai Wali Amanat.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Adhi Commuter Properti memastikan akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada kuartal keempat tahun ini dan membidik dana IPO sebesar Rp1,7 triliun. Perseroan saat ini sedang dalam proses menunjuk konsorsium penjamin emisi efek (underwriter) untuk menjadi perusahaan publik.

"Penunjukan underwriter sedang dalam proses beauty contest, mudah-mudahan akhir minggu atau bulan depan sudah ditunjuk. Targetnya Rp1,7 triliun," kata Direktur Keuangan ACP, Yusuf Ibrahim. • dot

DORO LONDA

KEDATANGAN KAPAL LAUT PERDANA TANJUNG PRIOK

Sejumlah penumpang Kapal Doro Londa saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (20/5). Pelabuhan Tanjung Priok kembali beroperasi pasca larangan mudik Lebaran 2021 dari Pemerintah.

INTERNATIONAL MEDIA, JUMAT 21 MEI 2021



PULAUINTAN

General Contractor





IDN/ANTARA



HARGA GABAH PADI TURUN

Petani menjaga tanaman padinya dari serangan hama burung pipit di areal persawahan Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/5). Harga gabah padi mengalami penurunan menjelang musim panen dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp3.100 per kilogramnya, akibatnya petani setempat menunda memanen padi dan berharap harga naik.

Neraca Dagang RI Defisit dengan **RRT dan Surplus terhadap AS**

JAKARTA (IM) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2021 masih tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yaitu defisit dengan RRT dan menang alias surplus dengan Amerika Serikat (AS).

Pada April 2021, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus US\$2,19 miliar secara bulanan. Hal itu dikarenakan nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan impor yang nilainya masingmasing US\$18,48 miliar dan US\$16,29 miliar.

Jika dilihat neraca perdagangan antar negara, Kepala BPS Suhariyanto mengatakan Indonesia masih surplus dengan AS dan beberapa negara lainnya seperti Filipina, India.

"Berdasarkan beberapa negara, kita alami surplus dengan AS, pada april 2021 sebesar US\$ 1,2 miliar, dengan Filipina surplus sebesar US\$554,1 juta yang dikarenakan nilai ekspornya US\$650,1 juta dan impornya US\$ 96,0 juta," kata Suhariyanto dalam video conference, Kamis (20/5).

Sedangkan dengan India, dia mengatakan surplusnya tercatat sebesar US\$ 439,9 juta. Sebab, nilai ekspornya masih lebih besar yaitu US\$ 1,1 miliar dan impornya US\$ 679,6 juta.

Diungkapkan Suhariyanto, meski menang dengan beberapa negara tersebut, neraca perdagangan masih tetap defisit dengan RRT dan beberapa negara lainnya seperti Australia dan Thailand.

"Sementara dengan beberapa negara yang kita alami defisit, misalnya dengan Tiongkok sebesar US\$652,1 juta, dengan Australia US\$418,3 juta, dan Thailand US\$ 248,1 juta," katanya.

Namun demikian, jika dilihat secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia berhasil surplus US\$7,72 miliar selama Januari-April 2021. Angka ini dikarenakan total nilai ekspor US\$ 67,38 miliar dan impor US\$59,67 miliar.

"Surplus yang besar ini menggembirakan dibandingkan tahun sebelumnya hanya US\$ 2,22 miliar, di 2019 defisit US\$ 2,28 miliar pada periode yang sama, 2018 defisit US\$ 1,41 miliar, dan 2017 juga sama surplusnya hanya US\$ 5,43 miliar,"

Kinerja ekspor dan impor Indonesia selama April 2021 tercatat masih sangat bergantung bahkan mengandalkan RRT "Pangsa pasar ekspor non migasnya, tidak berubah, di mana ekspor kita besar ke Tiongkok," kata Suharivanto.

Jika dilihat lebih detail lagi, total kontribusi RRT pada kinerja ekspor sebesar 22,40% atau setara US\$3,93 miliar. Di urutan selanjutnya ada Amerika Serikat (AS) dengan share 11,60% atau US\$2,03 miliar, di susul oleh Jepang dengan share 7,55% atau US\$1.32 miliar.

RRT juga tetap memuncaki pangsa pasar impor Indonesia pada April 2021. Dari total nilai impor US\$16,29 miliar, kontribusi RRT sebesar 32,10% atau US\$4,58 miliar. Selanjutnya ada Jepang dengan share 8,63% atau US\$1,23 miliar dan Singapura kontribusinya US\$5,78% atau US\$0,82 miliar. • dro

Hutama Karya Garap Proyek Jargas Senilai Ratusan Miliar di Jatim

JAKARTA (IM) - PT Hutama Karya (Persero) memperoleh kontrak baru untuk menggarap proyek Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) milik Kementerian ESDM. Proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) tersebut rencananya dibangun di beberapa wilayah, yakni Mojokerto, Jombang, Bojonegoro serta Lamon-

Direktur Operasi II Hutama Karya Ferry Febrianto mengatakan proyek senilai ratusan miliar ini akan digarap dalam waktu 7 bulan dan ditargetkan rampung pada Desember 2021 mendatang.

"Di pertengahan tahun ini, Hutama Karya kembali membuktikan portofolio perusahaan yang baik di bidang proyek EPC dengan diraihnya kepercayaan stakeholder kepada perusahaan untuk membangun proyek Jargas yang cukup besar," ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5).

"Tentu dalam pelaksanaan proyek ini, kami akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, guna menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu pelaksanaan proyek sehingga proyek diharapkan dapat berjalan dengan baik di tengah pandemi ini," tambahnya

Ia mengatakan, dalam pembangunan Jargas di 5 kabupaten di Jawa Timur tersebut, Hutama Karya akan menggunakan teknologi pengeboran Horizontal Directional Drilling (HDD) untuk memasang pipa air bersih, air limbah, minyak/gas dan lainnya.

Penggunaan teknologi HDD

ini dinilai telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan & Energi No. 300.K/38/M. pe/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi.

"Hutama Karya berkomitmen untuk menerapkan zero accident dengan penggunaan kualitas infrastruktur yang baik dengan pemasangan rambu dan persiapan peralatan sebaik mungkin. Kami juga memastikan pengerjaan proyek ini ramah lingkungan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Kami berharap proyek ini dapat berjalan dan

selesai tepat waktu," ungkapnya. Ferry menambahkan, pembangunan Jargas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah infrastruktur penyediaan dan pendistribusian gas bumi dalam rangka mendorong penggunaan gas bumi serta mengurangi subsidi BBM dan LPG. Maka, diharapkan dengan adanya proyek Jargas ini gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi dengan kualitas yang bersih, namun dengan harga terjangkau.

Adapun penandatanganan kontrak dilaksanakan di Gedung Migas Jakarta dan dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM merangkap Plt. Direktur Pembinaan Program Migas, Alimuddin Baso, Erikson Alfredo Simanjuntak dan Risris Risdianto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Executive Vice President Divisi Engineering, Procurement & Construction (EPC) Hutama Karya, Warjo. • hen